

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA WISATA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN JELITIK

Anthony Lee Mega Satria^{1*}, Bambang Ari Satria²

^{1,2}Institut Pahlawan 12, Sungailiat, Indonesia

*Korespondensi : anthonyleemegasatria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan rendahnya pengelolaan potensi pariwisata yang menyebabkan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah, serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program desa wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari organisasi pemerintahan, kelompok sadar wisata serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi program desa wisata di Kelurahan Jelitik yang dilihat dari empat indikator, hasilnya sudah berjalan dengan optimal. Namun dalam tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik yang dilihat dari tiga indikator, hasilnya belum berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena dalam tahapan pendayaan masih perlu di tingkatkan karena masyarakat masih belum dapat mandiri dalam mengelola potensi wisata, jika di lihat dari sarana dan prasarana yang ada di Pantai Tanjung Batu.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata

ABSTRACT

This research is motivated by the low management of tourism potential which causes a decrease in the number of tourist visits and contributions to government revenue, as well as community welfare. This study aims to determine how the implementation of the tourism village program in the context of community empowerment in Jelitik Village. The method used in this study is a qualitative research method with observation techniques, documentation studies, and in-depth interviews with informants from government organizations, tourism awareness groups and the community. Based on the results of the study, it is known that in the implementation of the tourism village program in Jelitik Village, seen from four indicators, the results have been running optimally. However, in the community empowerment stage in Jelitik Village, seen from three indicators, the results have not been optimal. This happens because the empowerment stage still needs to be improved because the community is still unable to independently manage tourism potential, when viewed from the facilities and infrastructure available at Tanjung Batu Beach.

Keywords : Implementation, Community Empowerment, Tourism Village

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama yang harus diperhatikan, salah satunya dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat untuk tercapainya perbaikan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat, dan dalam pengertian sehari-hari disebut sebagai upaya pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik.

Menurut Duadji (2014:30), pembangunan didefinisikan sebagai sebuah usaha yang dirancang secara sistematis untuk mengubah suatu kondisi menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tanpa menimbulkan kerusakan, melainkan dengan memperbaiki sumber daya yang ada dan memanfaatkan potensi yang tersedia. Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting, karena masyarakat berfungsi sebagai subjek pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling bawah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan mencerminkan konsep paradigma pemberdayaan.

Menurut Ife dalam Wibhisana (2021:34), pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan individu guna mengembangkan kapasitas diri, menentukan masa depan, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Secara sederhana, pemberdayaan bertujuan untuk

memperkuat kelompok yang kurang beruntung, seperti kelompok minoritas etnis atau budaya, serta mereka yang berada dalam kelas sosial rendah, seperti orang miskin dan pengangguran. Prinsip utama pemberdayaan masyarakat adalah perubahan yang berasal dari akar rumput, dengan memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan budaya lokal untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Ife dalam Wibhisana (2021:34), pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan kelompok yang kurang beruntung dalam mengendalikan pilihan hidup mereka, kesempatan, definisi kebutuhan, gagasan, institusi, sumber daya, aktivitas ekonomi, dan aspek reproduksi. Upaya ini dilakukan melalui intervensi berupa perencanaan dan kebijakan, aksi sosial dan politik, serta pendidikan.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:33), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat dan derajat masyarakat yang saat ini tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Mereka juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya, seperti kaum perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, didorong untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian mereka secara bertahap.

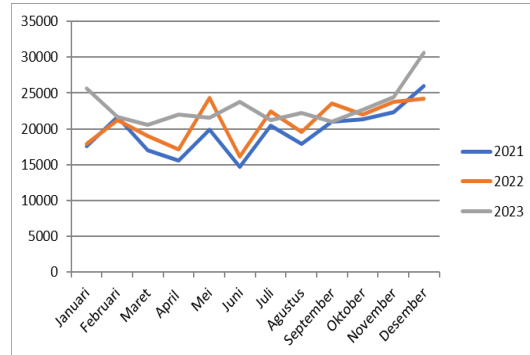
Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah melalui sektor pariwisata, karena sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan sektor pariwisata secara langsung berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 4 ayat (a, b, c, d), menjelaskan bahwa tujuan pariwisata adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengatasi masalah pengangguran. Tujuan-tujuan tersebut dirancang agar memberikan manfaat yang mencakup kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Kabupaten Bangka yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi wisata unggulan yang terfokus pada kekayaan alamnya. Potensi ini dapat memberikan keuntungan besar dalam sektor pariwisata, karena keindahan alam yang dimiliki dapat dijadikan sebagai destinasi wisata yang menarik minat wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, jika pengelolaannya dilakukan secara optimal. Kabupaten Bangka menawarkan beragam objek wisata, mulai dari pantai-pantai yang indah, perbukitan, danau, tempat ibadah, hingga situs-situs bersejarah yang mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.

Dari data yang diambil pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bangka Tahun 2021, 2022 dan 2023



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka yang dirilis DINPARBUD Kabupaten Bangka menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya, dimana total wisatawan pada tahun 2021 yakni 234.455 wisatawan dan pada tahun 2022 totalnya yakni 251.262 wisatawan dan pada tahun 2023 totalnya yakni 277.384 wisatawan. Situasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang prospek pariwisata di Kabupaten Bangka yang cukup menarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pengembangan pariwisata melalui berbagai inovasi dan keunikan dapat menjadi alternatif yang menarik bagi wisatawan, sehingga mereka tidak merasa bosan dengan destinasi yang tersedia.

Salah satu tujuan wisata di Kabupaten Bangka yang biasa dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri adalah wisata di Kelurahan Jelitik, terutama dengan adanya beberapa wisata pantai seperti Pantai Rambak, Pantai Teluk Uber, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Jati Pesona, Pantai Tikus Emas, Pantai Tikus dan Pantai Tanjung Batu. Kelurahan Jelitik

dapat dikatakan kaya akan dengan potensi wisata pantainya yang merupakan icon unggulan dibidang pariwisata. Pemandangan indah yang menghadap Selat Karimata dan bebatuan ditambah ketersediaan prasarana penunjang pariwisata seperti Hotel Tanjung Pesona, Hotel Peson Bay, dan Hotel Teluk Uber yang membuat daya tarik wisata pantai Kelurahan Jelitik tidak kalah saing dengan objek wisata pantai di daerah-daerah lainnya.

Selain itu, Kelurahan Jelitik juga memiliki objek wisata religi yang terus dikembangkan sehingga kemudian hari dapat menjadi salah satu alternatif destinasi wisata yang wajib dikunjungi wisatawan ketika berkunjung ke Kabupaten Bangka. Objek wisata religi dapat memberi edukasi kepada pengunjung terkait keragaman suku, ras, dan agama serta untuk membangun sikap toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. Adapun objek wisata religi yang ada di Kelurahan Jelitik antara lain Vihara Dewi Kuan Yin dan Bukit Sak Buk yang lokasinya tidak jauh dari wisata pantai di Kelurahan Jelitik, sehingga Kelurahan Jelitik termaksud salah satu wilayah yang dicanangkan sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata sehingga baik wisata alam maupun wisata religi akan terkelola dengan baik dan selanjutnya diharapkan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang akan memberikan kontribusi positif untuk Kabupaten Bangka. Dengan potensi wisata yang dimiliki, Kelurahan Jelitik menjadi salah satu Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bangka No 188.45/277/DINPARBUDAYA/2022

Tentang Penetapan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Sebagai Desa

Wisata di Kabupaten Bangka.

Desa wisata merupakan jenis pariwisata minat khusus yang dirancang secara terpadu, memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan alam, masyarakat, serta budaya dan tradisi setempat. Di Kelurahan Jelitik, wisatawan dapat menikmati pengalaman membeli, menyaksikan, merasakan, dan mempelajari berbagai nilai kearifan lokal yang masih terjaga dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nuryanti dalam Aliyah et al. (2020:11), desa wisata merupakan perpaduan antara akomodasi, atraksi, dan fasilitas pendukung yang harmonis dengan kehidupan serta tradisi masyarakat. Desa wisata (rural tourism) menawarkan pengalaman utuh mengenai kehidupan pedesaan, tradisi, keindahan alam, dan karakteristik khas yang mampu menarik perhatian wisatawan (Antara & Arida dalam Aliyah et al., 2020:11).

Desa Wisata di Kelurahan Jelitik secara tidak langsung diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, dan pariwisata dapat meningkatkan ekonomi melalui lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti industri kerajinan tangan, penginapan, cendera mata dan transportasi. Namun, disamping faktor-faktor pendukung yang menjadi kekuatan Kelurahan Jelitik dalam konteks kepariwisataan, terdapat sejumlah faktor kelemahan yang menjadi kendala bagi perkembangan kepariwisataan di Kelurahan Jelitik, hal itu dapat dilihat dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut:

Permasalahan Objek Wisata Di Kelurahan Jelitik

1. Pantai Teluk Uber dengan

permasalahan pengelolaan sampah untuk aspek kebersihan lingkungan wisata pantai Teluk Uber, belum ada penataan area wisata, baik secara ornamen arsitektur atau landscape, serta tidak ada atraksi wisata pantai, baik itu water sport dan restoran atau cafe-cafe.

2. Pantai Tanjung Pesona dengan permasalahan sarana transportasi.
3. Pantai Tikus Emas dengan permasalahan sarana transportasi.
4. Pantai Jati Pesona dengan permasalahan Promosi Pariwisata.
5. Pantai Rambak dengan permasalahan kebersihan, belum ada penataan area wisata, baik secara ornamen arsitektur atau landscape, serta tidak ada atraksi wisata pantai, baik itu water sport dan restoran atau cafe-cafe.
6. Vihara Dewi Kuan Yin dengan permasalahan kunjungan wisatawan semakin berkurang, fasilitas pendukung daya tarik pemandian banyak yang kondisinya tidak terawat, sehingga mengakibatkan pemandian tersebut tidak mempunyai daya tarik atau pesonanya, kolam pemandian yang menjadi daya tarik wisata faktanya dalam kondisi yang kotor dan tidak terawat.

Sumber: RIPPARDA Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025

Dapat dilihat diatas terkait permasalahan wisata di Kelurahan Jelitik yang dilihat dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan potensi pariwisata di Kelurahan Jelitik belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, namun Pemerintah Kabupaten Bangka terus

berupaya agar potensi pariwisata yang ada di Kelurahan Jelitik dapat berkembang lebih baik kedepannya.

Untuk menunjang kegiatan pengembangan di Kelurahan Jelitik upaya pemerintah salah satunya adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kelurahan Jelitik. Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Nomor 188.45/611/DINPARBUDAYA/2021 Tentang Pembentukan Pokdarwis di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kelurahan Jelitik pada khususnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001.MKP/2008, sadar wisata merupakan konsep yang melibatkan partisipasi aktif dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah atau destinasi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat menjadi tuan rumah yang baik, menciptakan suasana yang mendukung pariwisata, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sadar wisata juga bertujuan untuk memotivasi, meningkatkan kemampuan, dan membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai tanah air sebagai bagian dari peran mereka sebagai wisatawan.

Menurut Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Nomor 188.45/611/DINPARBUDAYA/2021 tentang Pembentukan Kelompok Sadar

Wisata Kelurahan Jelitik, kelompok sadar wisata diartikan sebagai sebuah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku pariwisata. Kelompok ini memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan peran sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah melalui sektor pariwisata sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pembentukan lembaga ini di Kelurahan Jelitik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan pariwisata, sehingga program desa wisata yang direncanakan dapat diterapkan secara optimal. Tahapan implementasi menjadi aspek krusial untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang konsisten agar tujuan yang telah disepakati bersama dapat tercapai.

Pada tahap ini, peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk bekerja sama secara sinergis dan konsisten dalam menjalankan program desa wisata. Kerja sama tersebut harus didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif, sehingga setiap elemen atau pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, demi tercapainya tujuan dari program desa wisata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk

menyajikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data lapangan terkait pelaksanaan Program Desa Wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Triangulasi dalam pengumpulan data. Yusuf (2017:395) mendefinisikan Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan hasil dan interpretasi data yang kredibel dan akurat.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu unsur Pemerintah berjumlah dua orang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berjumlah dua orang, dan dua orang masyarakat sekitar lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi melalui keputusan yang diambil. Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga tertentu, tetapi juga melibatkan berbagai jaringan kekuatan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Berkaitan dengan implementasi program Desa Wisata di Kelurahan Jelitik penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mengandung 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Lebih jelasnya bagaimana implementasi program Desa Wisata di Kelurahan Jelitik yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program kebijakan. Implementasi akan berlangsung dengan optimal jika tujuan dari program tersebut dapat disampaikan secara jelas dan akurat. Komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif.

Hasil dari wawancara, studi dokumentasi dan observasi berkaitan dengan komunikasi program desa wisata di Kelurahan Jelitik mengatakan bahwa Ada beberapa bentuk komunikasi yaitu pertama, adalah sosialisasi ke pengurus organisasi Pokdarwis yang ada di Kabupaten Bangka sebagai bentuk pembinaan dan selain sosialisasi juga mengadakan rapat rutin. Kedua, melakukan penyampaian informasi terkait Desa Wisata khususnya di Kelurahan Jelitik yaitu melalui media masa, seperti Facebook, Instagram, dan Youtube. Dan ketiga, penyampaian informasi juga disampaikan di kantor Kelurahan dengan media papan pengumuman.

Kemudian jika dilihat dari anggota Pokdarwis Kelurahan Jelitik mengatakan bahwa bentuk penyampaian informasi yang disampaikan Pokdarwis yang ada di Kelurahan Jelitik pada umumnya tidak hanya sekedar melaksanakan sosialisasi namun penyampaian informasi tersebut juga menggunakan media masa seperti Facebook, Instagram, Youtube dan juga informasi tersebut disampaikan di kantor kelurahan menggunakan papan pengumuman, sehingga penyampaian informasi dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

2. Sumber Daya

Personel yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlu memiliki

kompetensi dan keahlian yang memadai agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan arahan pimpinan. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai serta jumlah staf yang mencukupi untuk menangani tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, dukungan sumber daya finansial juga menjadi faktor krusial dalam menunjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial, program atau kebijakan tidak akan dapat berjalan secara optimal dan efisien.

Dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi berkaitan dengan sumber daya program desa wisata di Kelurahan Jelitik mengatakan bahwa sumber daya manusia dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang bertugas untuk membina kelompok sadar wisata (Pokdarwis) telah mendapat pembinaan dan pelatihan terkait sadar wisata dari Kementerian Pariwisata melalui bimtek secara online.

Kemudian dari pihak Kelurahan dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kelurahan Jelitik juga mengatakan hal yang senada dari segi sumber daya manusianya dan mereka memiliki kelompok sadar wisata yang terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Selain itu juga disini ada beberapa kelompok seperti Pokdarwis, karang taruna yang juga kita ikut sertakan dalam pelatihan peningkatan sumber daya pariwisata.

Sementara itu, jika dilihat dari sumber daya finansialnya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka maupun dari pihak Kelurahan Jelitik mengatakan belum adanya bantuan modal yang diberikan oleh pihak Kelurahan Jelitik, namun pihak Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan telah menganggarkan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait peningkatan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Hal senada juga dikatakan oleh pihak Kelurahan Jelitik kalau sumber pendanaan untuk bantuan modal saat ini belum ada namun pihak Kelurahan akan terus berusaha mencari relasi dengan pihak luar seperti pengusaha swasta untuk membantu masyarakat yang ingin berusaha dan butuh bantuan modal.

Selanjutnya jika dilihat dari Pokdarwis di Kelurahan Jelitik, ada semacam bantuan pinjaman modal untuk masyarakat yang mana sumber nya dari hasil pengelolaan Pantai yang di kelola oleh Pokdarwis tersebut. Jika di lihat dari sumber daya manusia nya dari pihak Kelurahan maupun dari pihak Pokdarwis telah mendapatkan semacam pelatihan terkait sadar wisata yang mana itu menjadi penunjang untuk implementasi program desa wisata yang ada di Kelurahan Jelitik.

3. Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaksana kebijakan memahami tugas yang harus dilakukan dan melaksanakannya, tetapi juga oleh tingkat komitmen serta sikap positif mereka terhadap kebijakan yang sedang dijalankan (Edward III dalam Joko Widodo, 2009:104). Edward juga menjelaskan bahwa disposisi ini mencakup kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk secara serius menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Hasil dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berkaitan dengan disposisi program desa wisata di Kelurahan Jelitik mengatakan bahwa pihak

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan komitmennya melalui pemberian pembinaan serta pelatihan kepada anggota Pokdarwis pada Kelurahan dan Desa di wilayah Kabupaten Bangka termasuk kelompok-kelompok yang ada di Kelurahan Jelitik, mereka diarahkan untuk memiliki kompetensi yang relevan dengan program Desa Wisata. Selain itu, upaya terus dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Sementara itu pihak Kelurahan Jelitik serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Jelitik menunjukkan komitmen yang baik, misalnya dengan memberika relasi atau bantuan untuk masyarakat mendapatkan bantuan modal untuk memulai usahanya dan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan pihak Kelurahan Jelitik maupun anggota Pokdarwis di Kelurahan Jelitik terus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward yang dikutip oleh Dedy Mulyadi (2016:69), struktur organisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek ini mencakup dua hal utama, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme program dirancang melalui *standard operating procedure* (SOP) yang tercantum dalam panduan kebijakan. Sementara itu, struktur organisasi perlu dirancang untuk menghindari kerumitan dan proses yang terlalu panjang, karena proses yang berbelit dapat melemahkan pengawasan serta menciptakan birokrasi yang rumit dan kompleks.

Dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berkaitan dengan disposisi program desa wisata di Kelurahan Jelitik mengatakan bahwa dari aspek tata cara atau mekanisme untuk bergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Jelitik, telah berjalan baik. Misalnya cara ingin bergabung hanya perlu berkoordinasi dengan pihak anggota Pokdarwis dan Kelurahan Jelitik dan selanjutnya pihak Kelurahan akan memetakan tugas dan fungsi anggota kelompok sadar wisata yang selanjutnya akan diberi pembinaan maupun pelatihan terkait sadar wisata.

Kemudian koordinasi juga sudah berjalan baik. Pihak Kelurahan Jelitik khususnya selalu berkoordinasi baik kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selalu membina dan memberikan pelatihan kepada Pokdarwis yang ada di Kabupaten Bangka dalam menjalankan programnya. Maupun kepada anggota Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Jelitik yang mana sebagai pelaksana program desa wisata di wilayah Kelurahan Jelitik dan juga mejadi binaan Pemerintah Kelurahan Jelitik yang membuat program desa wisata di Kelurahan Jelitik berjalan baik.

Penelitian ini juga membahas tahapan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program desa wisata di Kelurahan Jelitik. Dalam kajiannya, penulis mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, sebagaimana dikutip dalam Anggraini & Djumuarti (2019:9). Teori tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

Lebih jelasnya bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata di Kelurahan Jelitik yaitu sebagai berikut.

1. Tahapan Penyadaran

Tahap penyadaran dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang hak untuk menjadi mandiri serta memotivasi masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan, yang biasanya dilakukan melalui pendampingan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik melalui program desa wisata, langkah pertama yang diamati oleh penulis adalah proses penyadaran yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program desa wisata sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Hasil dari wawancara, studi dokumentasi dan observasi berkaitan dengan tahapan penyadaran program desa wisata di Kelurahan Jelitik mengatakan bahwa dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa mereka selalu rutin menyampaikan informasi terkait sadar wisata dan memberikan motivasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka. Kemudian jika dilihat dari pihak Kelurahan Jelitik dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang menjadi lokus penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk tahapan penyadaran yang disampaikan Pemerintah Kelurahan Jelitik beserta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Jelitik terus berupaya memotivasi masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk terus berusaha meningkatkan kapasitas diri dan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat diminati oleh para wisatawan.

Pada tahapan penyadaran ini dapat penulis katakan berjalan dengan baik karena terbukti sebelum adanya Pokdarwis di Kelurahan Jelitik masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mengelola potensi wisata yang ada di Kelurahan Jelitik. Namun setelah dibentuknya Pokdarwis, masyarakat bersama-sama membuat tempat wisata yang dikelola oleh Pokdarwis Kelurahan Jelitik yang sekarang dikenal dengan Pantai Tanjung Batu.

2. Tahapan Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu agar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan hidup (life skills). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik melalui program desa wisata, langkah berikutnya yang diamati oleh penulis adalah proses pengkapasitasan yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan sebagai bagian dari implementasi program desa wisata untuk memberdayakan masyarakat di wilayah tersebut.

Hasil dari observasi, studi dokumentasi dan wawancara berkaitan dengan tahapan pengkapasitasan program desa wisata di Kelurahan Jelitik dapat dikatakan sudah berjalan baik. Hal tersebut disebabkan baik dari pihak Dinas Pariwisata, Pemerintah Kelurahan Jelitik, maupun Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Jelitik terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang diberikan terkait kepariwisataan.

Pada tahapan pengkapasitasan ini dapat penulis katakan berjalan dengan baik

karena terbukti sebelum adanya Pokdarwis di Kelurahan Jelitik masyarakat belum memiliki kemampuan dalam mengelola tempat wisata dan mempromosi hasil usaha mereka secara lebih luas. Namun, setelah adanya pemberian pelatihan tentang sadar wisata dan daya tarik wisata masyarakat dapat mengelola tempat wisata beserta atraksi wisata dan pemasaran produk-produk hasil usaha masyarakat baik melalui media sosial maupun saat event yang diadakan oleh Pihak Kelurahan bersama Pokdarwis Kelurahan Jelitik.

3. Tahapan pendayaan.

Tahap pendayaan adalah tahap di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan mereka secara berkelanjutan, dengan memberikan peluang yang luas berdasarkan kapabilitas dan kapasitas masing-masing individu. Pendayaan juga mencakup akses terhadap akomodasi aspirasi masyarakat, serta bimbingan untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan program sebelumnya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik melalui program desa wisata, tahapan terakhir yang diamati oleh penulis adalah tahap pendayaan ini.

Hasil dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi berkaitan dengan tahapan pendayaan program desa wisata di Kelurahan Jelitik dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Pada tahapan pendayaan ini dapat penulis katakan belum berjalan dengan optimal karena meskipun anggota Pokdarwis telah memiliki kesadaran dan kapasitas namun mereka masih belum dapat dikatakan mandiri sehingga masih membutuhkan bantuan lain seperti bantuan peningkatan sarana prasarana di Pantai Tanjung Batu maupun bantuan pinjaman modal usaha untuk

masyarakat.

Namun disisi lain semenjak adanya pengelolaan Pantai Tanung Batu yang di kelola oleh kelompok sadar wisata di Kelurahan Jelitik terdapat sumber penghasilan baru bagi masyarakat seperti sewa saung, promosi UMKM, tempat permainan anak, biaya masuk Pantai serta live musik. Hasil dari pengelolaan Pantai ini digunakan untuk oprasional kegiatan di Pantai Tanjung Batu serta bantuan sosial untuk masyarakat di Kelurahan Jelitik.

Tahapan pendayaan tersebut tidak lepas dari bantuan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka melalui pengalokasian anggaran untuk peningkatan daya tarik wisata dan peningkatan SDM Pariwisata melalui sosialisasi dan pelatihan yang rutin di adakan setiap tahunnya.

Selain itu juga ada peran dari Pemerintah Kelurahan Jelitik yang selalu membina Pokdarwis agar diharapkan dapat secara mandiri mengelola daya tarik wisata di Kelurahan Jelitik. Selain pembinaan pemerintah Kelurahan Jelitik juga bekerjasama dengan pihak lain seperti swasta untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana seperti MCK, Musolah, maupun pembuatan saung di Pantai Tanjung Batu yang dikelola oleh Pokdarwis Kelurahan Jelitik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang terdapat pada pembahasan bahwa Implementasi Program Desa Wisata dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelitik sudah berjalan baik, namun untuk pemberdayaan masyarakat masih perlu di tingkatkan lagi.

Implementasi Program Desa Wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan Jelitik dapat dilihat berdasarkan empat indikator utama, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pada indikator komunikasi terbukti telah berjalan yaitu melalui sosialisasi, papan pengumuman dan menggunakan media masa. Sedangkan untuk indikator sumberdaya berupa pengalokasian anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM Pokdarwis melalui pelatihan sadar wisata. Pada indikator disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, dibuktikan telah adanya anggaran untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan komitmen untuk membantu masyarakat dalam memasarkan produk hasil usaha masyarakat. Dalam indikator struktur birokrasi juga sudah berjalan baik, terbukti dengan kemudahan tata cara bergabung dengan kelompok sadar wisata. Kemudian dalam hal koordinasi dari pemerintah Kabupaten kepada kelompok sadar wisata yang ada sudah berjalan baik, melalui pembinaan dan pengembangan Pokdarwis serta membantu dalam hal promosi daya tarik wisata melalui event-event maupun media masa.

Selanjunya jika dilihat dari bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik jika dilihat dari ketigaa tahapan, seperti tahapan pengkapasitasan, penyadaran dan pendayaan, yaitu sebagai berikut:

Dalam tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jelitik berdasarkan beberapa tahapan yang diteliti, berupa tahapan pendayaan, pengkapasitasan dan penyadaran masih perlu ditingkatkan. Meskipun terbukti tahapan penyadaran berupa pemberian motivasi telah diberikan dan tahapan

pengkapasitasan berupa pemberian pelatihan telah dilaksanakan, namun untuk tahapan pendayaan masih perlu di tingkatkan karena masyarakat masih belum dapat mandiri dalam mengelola potensi wisata di Kelurahan Jelitik, jika di lihat dari sarana dan prasarana yang ada di Pantai Tanjung Batu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aliyah, I., Yudana, G., & Sugiarti, R. (2020). *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*. Medan. Yayasan Kita Menulis.
- Duadji, Noverman. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Bandar Lampung. Graha Ilmu.
- Mardikanto, T, & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Kota Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Kota Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Kota Malang: Bayumedia.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kota Padang: Kencana.

Jurnal:

- Anggraini, F F & Djumiarti, T. (2019). *Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul Semarang*. *ejournal3*
- Wibhisana, Y, P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Kota Purworejo*. *Aspirasi: Jurnal*

Masalah-Masalah Sosial. Vol 12 (1): 34

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/277/DINPARBUDAYA/2022 Tentang Penetapan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bangka. 2022. Sungailiat. Bupati Bangka.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025. 2020. Sungailiat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 3 Seri D.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.011/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata. Jakarta. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Nomor 188.45/681/DINPARBUDAYA/2021 Tentang Pembentukan Pokdarwis Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat. 2021. Sungailiat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. 2013. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Lainnya:

Laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2021, 2022, dan 2023.